



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone



Alamat: Jl. A. Mappanyukki No. Kelurahan Macanang Kabupaten Bone

Email: disnakerkabbone@gmail.com / Website: <https://disnaker.bone.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang tiada terhingga Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan taufik dan hidayahnya sehingga penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun 2020 dapat diselesaikan berdasarkan realita kinerja dan hasil kerja sesuai dengan program yang telah dirumuskan.

LKj Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone dan komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Solusi Permasalahan dalam skema perbaikan pencapaian kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Laporan Akuntabilitas Tahun 2020 kami jadikan sebagai media untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan serta sebagai bahan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas

Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone.

Akhirnya, Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah pada masa yang akan datang.

Watampone, 02 Februari 2021

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Bone



Brs. ASISWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640830 199205 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.4 ISU STRATEGIS.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	13
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	16
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	17
2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	40
3.3 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN	41
3.4 PEMECAHAN MASALAH.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembentukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone. Tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kab.Bone.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 68 Tahun 2018, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone mempunyai tugas pokok menangani kewenangan di bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, diuraikan lebih lanjut dalam bentuk tugas pokok dan fungsi jabatan-jabatan struktural yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone, sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bone dalam melaksanakan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah di Kabupaten Bone.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang Ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Ketenagakerjaan;
2. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Ketenagakerjaan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Ketenagakerjaan;
3. Penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
4. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
5. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
7. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
8. Pelaksanaan pembinaan staf; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c) Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja

Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan Pelatihan kerja dan bimbingan lembaga pelatihan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemasaran, fasilitas pelatihan, hasil lulusan pelatihan;
- c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan lembaga latihan kerja swasta;
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian layanan informasi pelatihan tenaga kerja;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

d) Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas.

Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dan pengembangan produktivitas tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota.

Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dalam dan luar negeri;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar kerja dalam dan luar negeri;
- c. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- d. Pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- e. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas;
- f. Pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
- g. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan pemantauan tingkat produktivitas; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

e) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan koordinasi pelayanan tenaga kerja luar negeri.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. Pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja pada masyarakat;
- c. Pengoordinasian perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- e. Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- f. Pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
- g. Pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen Ketenagakerjaan Calon PMI ke luar Negeri;
- h. Pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- i. Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- j. Pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- k. Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

- l. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah/kota; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

f) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang mempunyai tugas melakukan pelayanan pembinaan dan sosialisasi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, melaksanakan mediasi terhadap perselisihan mogok kerja dan penutupan perusahaan serta membina kelembagaan dalam pengupahan ketenagakerjaan.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- b. Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota;
- c. Pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

g) UPTD BLK Bone

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Latihan Kerja – Usaha kecil Menengah (UPTD LLK-UKM) Bajoe mempunyai tugas pokok meningkatkan pelaksanaan latihan kerja dan keterampilan bagi tenaga kerja dan pencari kerja, fasilitas pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pemanfaatan secara optimal lembaga latihan kerja yang ada dalam rangka penyiapan tenaga kerja siap pakai.

B. Struktur Organisasi

Seiring dengan perubahan penataan kelembangaan daerah sebagai akibat perubahan pemerintah dari PP Nomor 08 Tahun 2003 ke PP Nomor 41 tentang organisasi perangkat daerah ke peraturan bupati nomor 68 tahun 2018 berubah menjadi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone sudah tidak menjalankan urusan transmigrasi dan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Eselon II/b dan di bantu oleh seorang Sekretaris Eselon III/a, 4 (empat) orang yang bereselon III/b dan 15 (Lima belas) orang yang bereselon IV/a yang terdiri dari Kasubag dan Kepala Seksi serta Kepala UPTD.

Adapun Bagian/ Bidang dan sub bagian tersebut adalah :

- a. Sekretaris, Membawahi Kepala sub bagian sebagai berikut :
 - Kepala Sub Bagian Program.
 - Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kepala Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja, membawahi kepala seksi :
 - Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Pelatihan
 - Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kerja.
 - Kepala Seksi Standafrisasi, Sertifikasi dan Akreditasi.
- c. Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas :
 - Seksi Informasi Pasar Kerja.
 - Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - Seksi Standarisasi Produktivitas Tenaga Kerja.

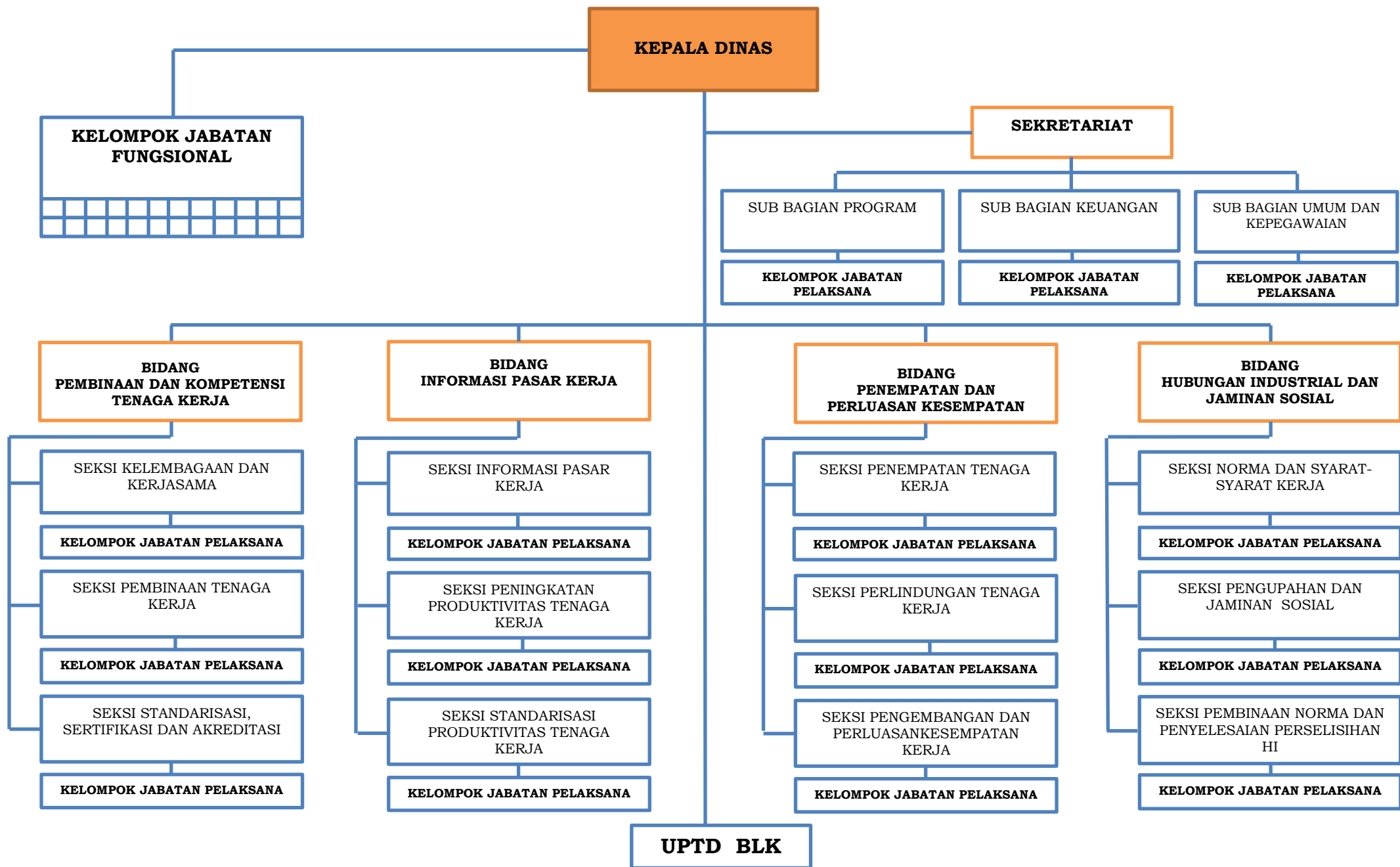
- d. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja:
 - Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja.
 - Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- e. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahi kepala seksi :
 - Kepala Seksi Pembinaan Norma dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - Kepala Seksi Norma dan Syarat-Syarat Kerja.
 - Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Bone.

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone tahun 2020 sebanyak 62 orang yang terdiri dari :

- a. PNS sebanyak 37 orang
- b. Tenaga Kontrak/ Sukarela 30 orang
1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS terdiri dari :
 - a. SD : - orang
 - b. SLTP : - orang
 - c. SLTA : 3 orang
 - d. D.I : 1 orang
 - e. D.III : 3 orang
 - f. Sarjana (S1) : 25 orang
 - g. Pasca Sarjana (S2) : 5 orang
2. Berdasarkan Golongan terdiri dari :
 - a. Gol. II/a : - orang
 - b. Gol. II/b : 4 orang
 - c. Gol. II/c : 5 orang
 - d. Gol. II/d : - orang
 - e. Gol. III/a : 9 orang
 - f. Gol. III/b : 4 orang
 - g. Gol. III/c : 7 orang
 - h. Gol. III/d : 5 orang
 - i. Gol. IV/a : 0 orang
 - j. Gol. IV/b : 2 orang

- k. Gol. IV/c : 1 Orang
- 3. Berdasarkan Jenis Kelamin PNS terdiri dari :
 - a. Laki-Laki : 20 orang
 - b. Perempuan : 17 orang
- 4. Berdasarkan Diklat Struktural terdiri dari :
 - a. Latpim I : - orang
 - b. Latpim II : 1 orang
 - c. Latpim III : 1 orang
 - d. Latpim IV : 7 orang
- 5. Tenaga Kontrak/ Sukarela terdiri dari :
 - a. SLTA : 13 orang
 - b. DIII : 1
 - c. S1 : 16 orang
- 6. Berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari :
 - a. Laki-Laki : 13 orang
 - b. Perempuan : 17 orang

Berdasarkan analisis data kepegawaian dalam hal dukungan sumber daya manusia pada Dinas Ketenagakerjaan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone tahun 2020, maka dapat diketahui kuantitas dan kualitas aparatur cukup memenuhi dalam mendukung upaya pencapaian, Visi, Misi dan Program Kerja Tahunan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone meskipun disadari bahwa akselerasi pencapaian *Outcome* kegiatan masih diperlukan sentuhan pembinaan kepada seluruh staf khususnya pada aspek Teknis Fungsional.



1.4 ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ditemui beberapa kendala atau permasalahan namun tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas secara umum.

Kendala atau permasalahan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1 Proses pencairan dana kadang-kadang terlambat sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
- 2 Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, pendidikan dan pelatihan masih terbatas
- 3 Keterbatasan tenaga pelatih/ instruktur latihan keterampilan belum maksimal
- 4 Keterbatasan pejabat teknis fungsional terutama aparat tenaga pengantar kerja dan mediator hubungan industrial
- 5 Tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga instruktur masih relatif rendah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

2.1.3.1 Tujuan

Tujuan dari pembangunan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

"Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Daerah"

Indikator kinerja

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Presentase Penyerapan Tenaga Kerja yang Terlatih
3. Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL)
4. Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
5. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)
6. Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan pada Perusahaan
7. Presentase Peserta Jamsostek Aktif
8. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan	Nilai SAKIP oleh APIP	Predikat	CC	A
2	Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,40	3,50
		Presentase Penyerapan Tenagakerja yang Terlatih	%	52,9	70
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL)	Orang	5785	6087
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Orang	200	430
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orang	10	36
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan pada Perusahaan	Orang	580	1.165
		Presentase Peserta Jamsostek Aktif	%	73,24	76,21
		Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100

2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan urusan ketenagakerjaan
2. Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten.
3. Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja.

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan	Nilai SAKIP oleh APIP	Predikat	CC	A
2	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga kerja yang Berkompeten	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,40	3,50
		Persentase Penyerapan Tenagakerja yang Terlatih	%	52,9	70
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL)	Orang	5.785	6.087
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Orang	200	430
		jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orang	10	36
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan pada Perusahaan	Orang	580	1.165
	Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Peserta Jamsostek Aktif	%	73,24	76,21
		Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2018-2023 oleh Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan- Program Penunjang Pemerintahan Umum
Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan	Nilai SAKIP oleh APIP	Predikat	B
2	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,10
		Presentase Penyerapan Tenaga Kerja yang Terlatih	%	60,3
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL)	Orang	5.957
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Orang	350
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orang	20
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan pada Perusahaan	Orang	774
	Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Peserta Jamsostek Aktif	%	74,05
		Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5
IKU Dinas Ketenagakerjaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	DISNAKER
		Presentase Penyerapan Tenaga Kerja yang Terlatih	$\frac{\text{jumlah tenaga kerja terserap terlatih}}{\text{jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	UPTD BLK dan Bidang Pengembangan
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL)	jumlah tenaga kerja antar kerja lokal.	Laporan Tahunan	Bidang Penempatan dan Bidang IPK
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)	jumlah pekerja migran indonesia yang terdaftar	Laporan Tahunan	Bidang Penempatan
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan pada Perusahaan	jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan	Laporan Tahunan	Bidang Penempatan
	Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Peserta Jamsostek aktif	$\frac{\text{jumlah peserta jamsostek aktif}}{\text{jumlah buruh/pekerja}} \times 100$	Laporan Tahunan	Bidang Hi
		Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\text{jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{jumlah kasus yang ditangani}} \times 100$	Laporan Tahunan	Bidang Hi

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.061.244.633 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Belanja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.445.244.633	100
2	Belanja Langsung	1.616.000.000	100
Jumlah		Rp. 5.061.244.633	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan	Nilai SAKIP oleh APIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	592.159.075	540.025.087	91,20%
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	117.703.775	80.398.487	68,31%
		- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	126.192.000	118.894.000	94,22%
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.663.000	4.548.000	97,53%

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan			
		- Peraturan Perundang-undangan	16.460.000	11.460.000	69,62%
		Rapat-rapat Kordinasi Dan			
		- Konsultasi Ke Luar Daerah	225.461.400	225.326.800	99,94%
		Pelaksanaan			
		- Administrasi Perkantoran	101.678.900	99.397.800	97,76%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	124.725.350	118.183.365	94,75%
		Pengadaan			
		- Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	0%
		Pengadaan			
		- Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	0%
		- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	9.000.000	100%
		- Pengadaan Mobelur	-	-	0%
		Pemeliharaan			
		- Rutin/berkala Gedung Kantor	68.957.500	68.900.000	99,92%
		Pemeliharaan			
		- Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	42.467.850	37.803.365	89,02%
		Pemeliharaan			
		- Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	2.100.000	1.500.000	71,43%
		Pemeliharaan			
		- Rutin/Berkala Peralatan Kantor	2.200.000	980.000	44,55%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.500.000	7.500.000	98,51%
		- Pendidikan Dan Pelatihan Formal	7.500.000	7.500.000	100%

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Program Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.049.500	17.042.500	99,96%
		Penyusunan Laporan Capaian - Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.664.000	6.657.000	99,89%
		Penyusunan - Laporan Keuangan Semesteran	10.385.500	10.385.500	100 %
		Program Penunjang Pemerintahan Umum	7.604.000	7.604.000	100%
		Penyusunan - Rencana Perangkat Daerah	7.604.000	7.604.000	100%
		Pengelolaan - Website Perangkat Daerah	-	-	0%
		Promosi dan - Pameran Pembangunan	-	-	0%
Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenagakerja yang Berkompeten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.080.882.400	1.056.793.070	97,77%
	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih.	Pendidikan dan Pelatihan - Keterampilan Bagi Pencari Kerja	436.648.700	436.045.400	99,86%
	Jumlah Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKAL).	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana BLK	63.159.000	63.000.000	99,75%
	Jumlah Tenagakerja pada Perusahaan	Bimtek Pelatihan - Berbasis Kompetensi	11.965.500	11.870.000	99.20%
	Jumlah Tenagakerja	Sosialisasi standar kompetensi kerja lembaga pelatihan kerja (LPK)	-	-	0%

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	Indonesia (TKI)	Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan	46.490.000	46.490.000	100%
		Pengadaan Peralatan	-	-	0%
		Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	-	-	0%
		Pembinaan Penatausahaan dan Evaluasi Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	0%
		Sosialisasi Regulasi Bidang Pelatihan Kerja	27.220.000	25.700.000	94,42
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	657.127.000	648.389.300	98,67%
		Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri	3.150.000	3.150.000	100,00%
		Bimtek Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	3.650.000	3.650.000	100%
		Job Fair Bursa Kerja	-	-	0%
		Sosialisasi Mekanisme Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja	103.833.000	103.427.000	99,61%
		Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	38.452.250	38.452.250	100%
		Penyusunan Data Base Informasi Pasar Kerja	29.152.625	29.142.000	99,61%

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Monitoring Evaluasi - Penempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	25.877.500	25.173.500	97,28%
		Pemberdayaan - Tenaga Kerja AKL/ AKAD	-	-	0%
		Pembinaan Purna - Tenaga Kerja Indonesia	-	-	0%
Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Peserta Jamsostek Aktif	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	86.263.500	86.129.200	99,84%
	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Bimtek Penyusunan SUSU (Struktur Skala Upah)	17.110.000	17.110.000	100%
		Pembinaan dan Penyelesaian HI (Hubungan Industrial)	3.5076.000	35.053.800	99,94%
		Pembinaan Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	34.077.500	33.965.400	99,67%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/ kegiatan sebesar Rp. 1.6160.000.000,- dengan jumlah program sebanyak 8 dan Kegiatan sebanyak 40 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.553.683.052,-. Walaupun tidak semua kegiatan dapat terlaksana karena adanya refofusing anggaran di tahun 2020 akibat adanya pengalihan anggaran untuk dana Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang mulai dirasakan masyarakat *global* pada tahun 2020, tentunya tidak dapat dihindari dalam mempengaruhi berbagai skema pembangunan dan pencapaian kinerja, baik di tingkat Nasional

maupun tingkat daerah. Sumber daya yang ada tahun 2020 lebih banyak diprioritaskan pada penanganan Covid-19 dan mendukung ekonomi masyarakat yang terdampak. Hal ini juga tentu akan mempengaruhi pencapaian kinerja dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone untuk tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$> 100 \%$	<i>Baik Sekali</i>
2	$76 \% \leq 100 \%$	<i>Baik</i>
3	$66 \% \leq 75 \%$	<i>Cukup</i>
4	$51 \% \leq 65 \%$	<i>Kurang</i>
5	$\leq 50\%$	<i>Sangat Kurang</i>

3.1.2 SASARAN 1

Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang

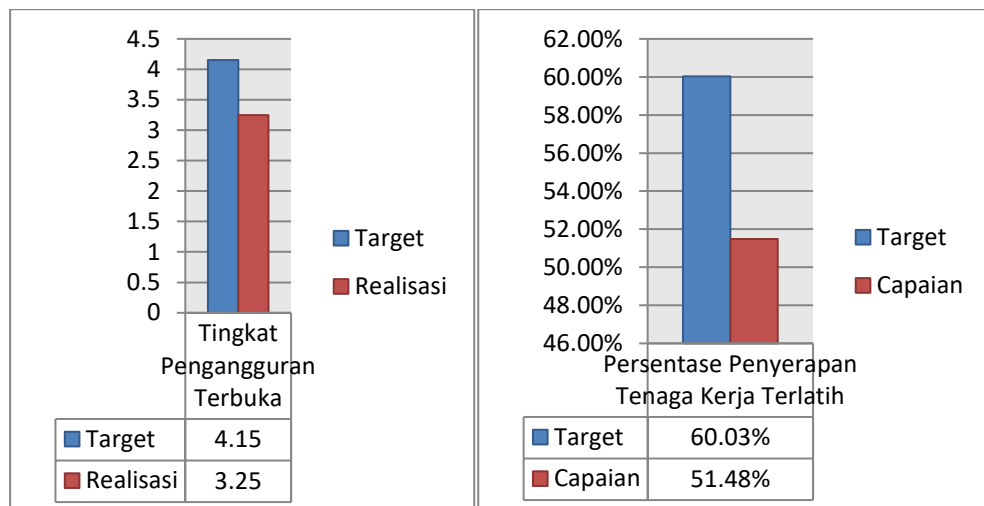
Berkompeten

a. Analisis Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.2.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,15%	3,25 %	100%
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih	60,03%	51,48 %	85,75 %

- Data Proyeksi*



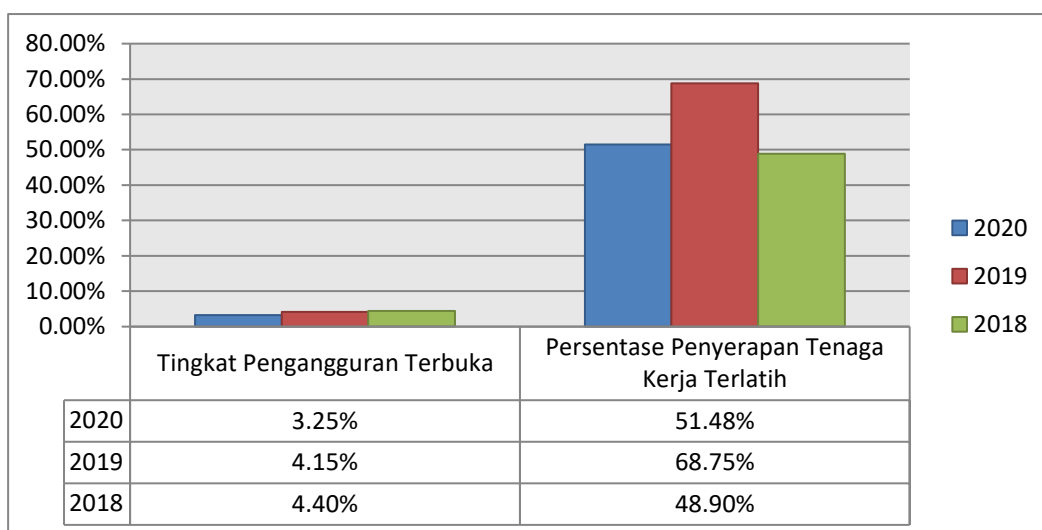
1. Berdasarkan tabel dan diagram tersebut di atas dapat dibandingkan antara realisasi sebesar 3,25 % dengan target 4,30 % yaitu tercapai adanya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian 100% dari target di tahun 2020. Indikator capaian ini menunjukkan adanya pencapaian target dengan pencapaian semakin kecil, maka pencapaian semakin baik.
2. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dibandingkan antara realisasi sebesar 51,48% dengan target 60,03% untuk tingkat Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih yaitu tercapai sebesar 85,75 %

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		
				2020	2019	2018
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,15%	3,25 %	4,15 %	4,40%
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja terlatih	60,3%	51,48%	68.75%	52,9%

• *Data Proyeksi*



1. Berdasarkan tabel dan diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah melampaui target pada tahun 2020. Capaian indikator tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebanyak 3.25% dan jumlah angkatan kerja sebanyak 332,903 orang, sehingga didapat 3,25% dari Realisasi pada tahun 2020. Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 mencapai 4,15% sedangkan jumlah angkatan kerja sebanyak 348,936 orang sehingga didapat 4,15% dimana dapat dikatakan tingkat pengangguran menurun 0,9% dengan Capaian dikategorikan Baik.

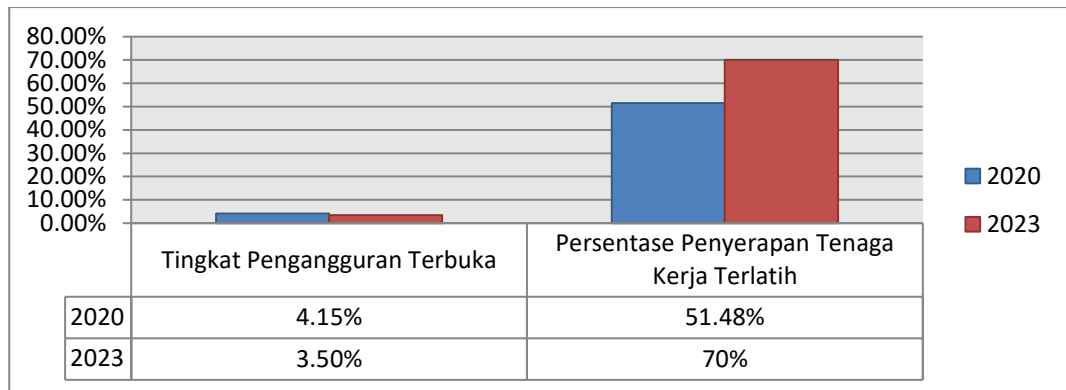
Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh Upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan produktivitas calon tenaga kerja berupa sosialisasi sosialisasi bagi para pencari kerja maupun perusahaan dan juga membuka pelatihan kerja yang dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan agar para pencari kerja memiliki keterampilan yang mumpuni sehingga dapat di terima pada perusahaan maupun membuka usaha sendiri.

2. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih belum mencapai target di tahun 2020. Capaian indikator tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 68,75% dan Realisasi pada tahun 2020 sebanyak 338 Orang yang dilatih dan 174 orang yang terserap sehingga mencapai 51,48% dimana dapat dikatakan dengan Capaian dikategorikan kurang.

c. Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.4.

No	Indikator Kinerja	Target		
		2020	2023	%
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,15 %	3,50 %	118,5
2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih	51,48%	70%	73,54



1. Berdasarkan perbandingan dengan target akhir Restra di atas, menunjukkan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 118,5%.
2. Berdasarkan perbandingan dengan target akhir Restra sampai 2023 di atas, menunjukkan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 73,54%.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta solusi yang telah Dilakukan

1. Walaupun telah mencapai target namun masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu tingkat Angkatan kerja yang masih banyak disebabkan karena jumlah tamatan SMP dan SMA setiap tahunnya meningkat di banding tahun sebelumnya, selain itu permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak pencari kerja yang belum mempunyai kemampuan atau kriteria yang dibutuhkan pasar kerja/perusahaan.
2. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh Upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas ketenagakerjaan Kab. Bone telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan produktivitas calon tenaga kerja dengan membuka pelatihan kerja yang dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan agar para pencari kerja memiliki keterampilan yang mumpuni sehingga dapat di terima pada perusahaan maupun membuka usaha sendiri.

e. Analisis Efisiensi Sumber Daya Bila Dibandingkan dengan Capaian dan Realisasi Anggaran dapat Dijelaskan dalam Tabel Berikut :

Tabel 3.5.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi %
1	Tersedianya Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	100%	99,11%	0,89%
2		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih.	85,75 %	97,36%	78.7%
Rata – Rata					

1. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,89%. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran.
2. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih memiliki tingkat efisiensi sebesar 78,7% yang berarti bahwa capaian kinerja lebih besar dari Realisasi Anggaran.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator kinerja utama tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket.
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	436,648,700	436,045,400 (99,86%)	APBD
		Sosialisasi Mekanisme Penempatan dan	103,833,000	103,427,000 (99.61%)	APBD

		Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia			
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui TKM	3,150,000	3,150,000 (100%)	APBD

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

1. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh Upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas ketenagakerjaan telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan produktivitas calon tenaga kerja berupa sosialisasi sosialisasi bagi para pencari kerja maupun perusahaan dan juga membuka pelatihan kerja yang dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan agar para pencari kerja memiliki keterampilan yang mumpuni sehingga dapat di terima pada perusahaan maupun membuka usaha sendiri,
2. Walaupun telah mencapai target namun masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu tingkat angkatan kerja yang masih banyak disebabkan karena jumlah tamatan SMP dan SMA setiap tahunnya meningkat di banding tahun sebelumnya, selain itu permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak pencari kerja yang belum mempunyai kemampuan atau kriteria yang dibutuhkan pasar kerja/ perusahaan.

1. Indikator 2

a. Analisis Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.7.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih	60,03%	51.48%	85,75 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dibandingkan antara realisasi sebesar 51,48% dengan target 60,03% yaitu tercapai sebesar 85,75%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.8.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		
				2020	2019	2018
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih	60,03%	51,48	68.75%	52,9%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih belum mencapai target. Capaian indikator tersebut di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 68,75% dan realisasi pada tahun 2020 sebanyak 338 Orang yang dilatih dan 174 orang yang terserap sehingga mencapai 51,48 % dimana dapat dikatakan dengan capaian dikategorikan kurang.

Tingkat pencapain indikator kinerja yang belum mencapai target juga banyak dipengaruhi secara signifikan akibat dampak pandemi Covid-19 tahun 2020. Hal ini sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja terlatih dikarenakan banyaknya perusahaan yang tidak mau berspekulasi dalam penerimaan tenaga kerja di masa pandemic yang sebaliknya banyak merumahkan tenaga kerja, serta adanya kebijakan PSBB oleh pemerintah, baik dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

c. Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.9.

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2020	2023	%
1.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih	51,48%	70 %	73,54

Berdasarkan perbandingan dengan target akhir Restra di atas, menunjukkan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2020 masih belum mencapai target Renstra tahun 2023.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh Upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas ketenagakerjaan telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan produktivitas calon tenaga kerja dengan membuka pelatihan kerja yang dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan agar para pencari kerja memiliki keterampilan yang mumpuni sehingga dapat di terima pada perusahaan maupun membuka usaha sendiri.

e. Analisis efisiensi sumber daya bila dibandingkan dengan capaian dan realisasi anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi %
	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih.	85,75%	97,36%	11.61%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efesiensi sebesar 11,61% yang berarti bahwa capaian cukup baik dari Realisasi Anggaran.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator kinerja utama tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket.
1	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	436,648,700	436,045,400 (99,86%)	APBD

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun telah mencapai target namun masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu tingkat Angkatan kerja yang masih banyak disebabkan karena jumlah tamatan SMP dan SMA setiap tahunnya meningkat dibanding tahun sebelumnya, selain itu permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak pencari kerja yang belum mempunyai kemampuan atau kriteria yang dibutuhkan pasar kerja/perusahaan. Untuk alternatif solusi Peningkatan kualitas dan produktivitas calon tenaga kerja berupa Pelatihan & sosialisasi agar para pencari kerja memiliki keterampilan yang mumpuni sehingga dapat diterima pada perusahaan maupun membuka usaha sendiri.

h. Indikator 3

Tabel 3.12.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		
				2020	2019	2018
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL)	5.825 Orang	6.483 Orang	5.082 Orang	5.785 Orang



Berdasarkan tabel/ diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih dengan Indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) mencapai dari target yang ditentukan pada tahun 2020. Capaian indikator tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 untuk jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 5.082 orang sedangkan realisasi pada tahun 2020 mencapai 6.483 orang, dimana dapat dikatakan dengan Capaian dikategorikan Sangat Baik.

Walaupun mencapainya target pada tahun 2020 tapi masih terdapat beberapa permasalahan seperti tidak meratanya penyebaran AKL yang ditempatkan, beberapa faktor juga disebabkan terdapat permasalahan yang terjadi yaitu masih kurang informasi lowongan perusahaan yang dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone, sehingga masih kurangnya informasi yang diterima oleh para pencari kerja mengenai lowongan pekerjaan, selain itu juga masih banyaknya pencari kerja yang belum mempunyai kemampuan dan belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan.

Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu di perlukan peningkatan lebih terhadap upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Ketenagakerjaan Kab.Bone berkoordinasi dengan instansi terkait, *stakeholder* dan perusahaan dalam mengurangi pengangguran melalui penyerapan/ penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKAL)

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator kinerja utama tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

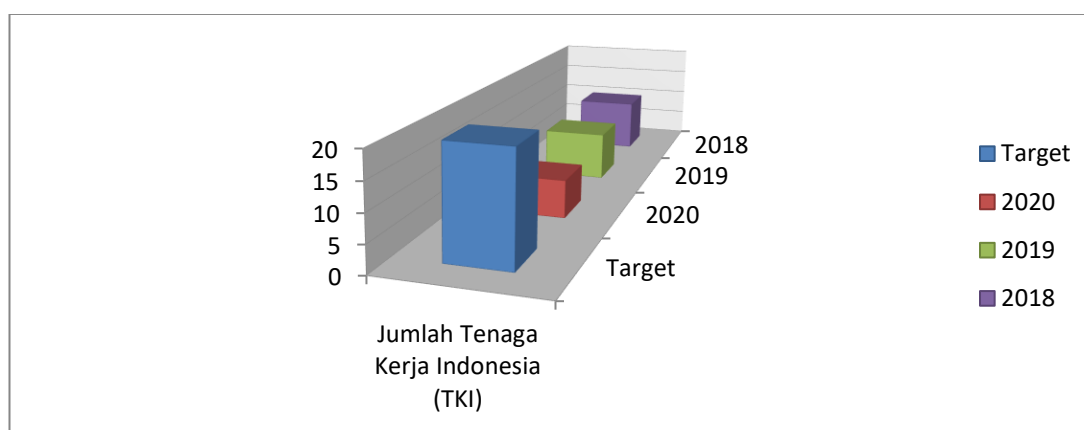
Tabel 3.13.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket.
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	436,648,700	436,045,400 (99,86%)	APBD

i. Indikator 4

Tabel 3.14.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		
				2020	2019	2018
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	20 orang	7 orang	9 orang	10 orang



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum mencapai target. Dengan target 20 Orang untuk tahun 2020, hanya mampu Capaian 7 orang. Indikator tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu 9 orang dan Realisasi pada tahun 2018 mencapai 10 orang dimana dapat dikatakan dengan Capaian dikategorikan kurang.

Ketidakberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh masih banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara *illegal* atau tidak terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia tanpa melalui prosedur dalam penempatan tenaga kerja Indonesia. Selain itu, dengan adanya Pandemi Covid-19 pada

tahun 2020 juga menjadi penyebab signifikan dalam Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ke luar negeri karena adanya beberapa Negara yang tidak membuka akses masuk kenegarannya khususnya sebagai Tenaga Kerja.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat banyak, tetapi sebagian besar dari TKI tersebut berangkat untuk bekerja di luar negeri tidak melalui proses ataupun prosedur yang ada, maka dari itu jumlah TKI yang terdata sangat sedikit. Maka dari itu diperlukan peran dan upaya Pemerintah dari tingkat paling atas hingga ke paling bawah untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi ataupun memfasilitasi kepada masyarakatnya mengenai penempatan tenaga kerja diluar negeri.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator kinerja utama tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.15.

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Ket.
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Sosialisasi Mekanisme Penempatan dan Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia	103.833.000	103.427.000 (99.99%)	APBD
		Pembinaan Purna Tenaga Kerja Indonesia	-	-	APBD

Analisis efisiensi sumber daya bila dibandingkan dengan capaian dan realisasi anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16.

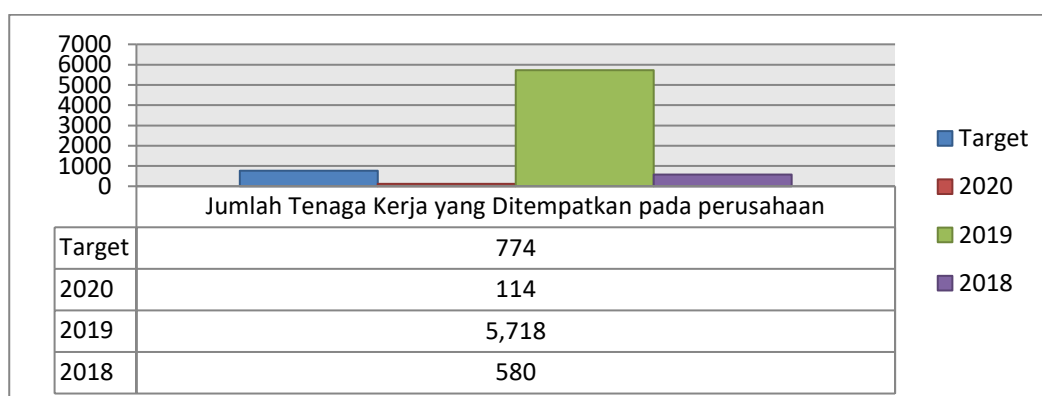
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi %
----	---------	-------------------	---------------------	------------------------	-------------

	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	35%	99,99%	<i>Tidak efisien</i>
--	--	-------------------------------------	-----	--------	----------------------

j. Indikator 5

Tabel 3.17.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		
				2020	2019	2018
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan pada Perusahaan	774 Orang	114 Orang	5,713 Orang	580 Orang



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada perusahaan Melebihi target. Capaian indikator tersebut mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 5.713 orang dan Realisasi pada tahun 2020 hanya mencapai 114 orang dari target 774 orang dimana dapat dikatakan dengan Capaian dikategorikan sangat kurang.

Pencapaian target indikator yang menurun disebabkan oleh ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada perusahaan yaitu tingginya syarat dan kriteria yang dibutuhkan perusahaan, dan kurangnya kualitas dan keterampilan pencari kerja dan juga kurangnya perusahaan yang membuka penerimaan tenaga kerja karena adanya

pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi perusahaan dalam penerimaan pegawai.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Ketenagakerjaan terus melakukan upaya dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada perusahaan melalui program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi maupun keterampilan pencari kerja, serta sosialisai sosialisasi bagi perusahaan dan pencari kerja.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator kinerja utama tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.18.

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	436.648.700	436.045.400 (99,86%)	APBD
		Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	38.452.250	38.452.250 (100%)	APBD
2	Peningkatan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui TKM	3.150.000	3.150.000 (100%)	APBD

Analisis efisiensi sumber daya bila dibandingkan dengan capaian dan realisasi anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.19.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi %
1	Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten	Jumlah Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan Pada Perusahaan	35%	99,99%	<i>Tidak efisien</i>

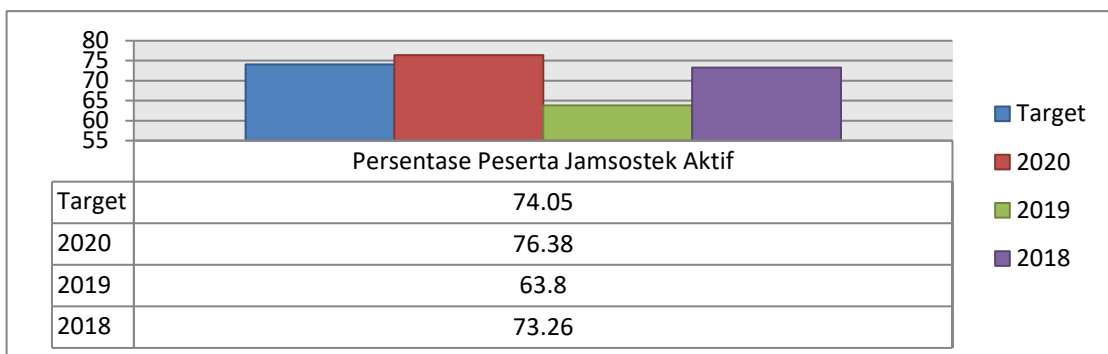
4. SASARAN 2

1. Indikator 1

Tabel 3.20.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		
				2020	2019	2018
1.	Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Peserta Jamsostek Aktif	74,05%	76,38%	63,8%	73,26%

- Data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Persentase Peserta Jamsostek aktif sudah mencapai target. Dari target 74,05 %, realisasi pada tahun 2020 yaitu 76,38 %, dengan Capaian Baik.

Jumlah Peserta Jamsostek Aktif pada tahun 2019 sebanyak 12.086 orang atau 63,8% yang menjadi peserta Jamsostek dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 14.464 orang atau 82,99% dimana target yang ingin dicapai dalam RKPD sebesar 74,05%. Data tersebut sudah menunjukkan bahwa indikator kinerja sudah mampu mencapai target dengan kategori baik.

Pekerja/ buruh yang terdaftar sebagai kepesertaan Jamsostek pada tahun 2020 sudah menunjukkan peningkatan peserta, dengan nilai kinerja 76,38. Walaupun sudah dapat nilai kategori Baik, tetapi tingginya jumlah buruh belum sebanding dengan jumlah yang terdaftar kepesertaan Jamsostek. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya perusahaan ataupun instansi yang tidak mendaftar ataupun memasukkan pekerja atau buruhnya dalam kepesertaan Jamsostek. Adapun hal yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek antara lain :

- Meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan maupun pekerja terhadap pentingnya jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja.
- Mewajibkan kepada pemilik usaha yang melakukan pengurusan izin usaha maupun perpanjangan izin usaha, agar diwajibkan mendaftarkan semua karyawan dalam kepesertaan Jamsostek.
- Mendaftarkan tenaga tenaga kontrak/ honorer dalam SKPD pemerintahan daerah menjadi peserta Jamsostek.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator kinerja utama tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.21.

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Ket.
1	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Pembinaan Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	34.077.500	33.965.400 (99,67%)	APBD

Analisis efisiensi sumber daya bila dibandingkan dengan capaian dan realisasi anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

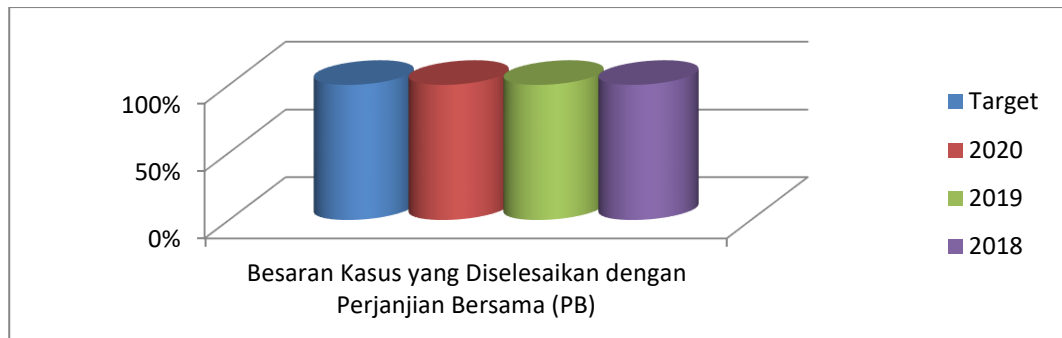
Tabel 3.22.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi %
	Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Peserta Jamsostek Aktif	76,38%	99,67%	0,33%

2. Indikator 2

Tabel 3.23.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		
				2020	2019	2018
1.	Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	100%	100%



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada Indikator Kinerja Utama Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama belum mencapai target jumlah kasus yang masuk tahun 2020 yaitu sebanyak 10 Kasus dengan penyelesaian dan semua kasus diselesaikan dengan Perjanjian Kerja. Sehingga berdasar Indikator Kinerja Utama, data tersebut mencapai 100% dan dikategorikan dengan capaian dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut maka telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.24.

NO	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Ket.
1	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Bimtek Penyusunan SUSU (Struktur Skala Upah)	17.110.000	17.110.000 (100%)	APBD
		Pembinaan dan Penyelesaian HI (Hubungan Industrial)	35.076.000	35.053.800 (99,94%)	APBD
		Pembinaan Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	34.077.500	33.965.400 (99,67%)	APBD

Analisis efisiensi sumber daya bila dibandingkan dengan capaian dan realisasi anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.26.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi %
----	---------	-------------------	---------------------	------------------------	-------------

	Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah	Persentasi Peserta Jamsostek aktif	76,38%	99,67%	0,33%
--	---	------------------------------------	--------	--------	-------

3. SASARAN 3

1. Indikator 1

a. Analisis Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.27.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan	NILAI SAKIP oleh APIP	B		

**Berdasarkan tabel diatas hasil perbandingan belum dapat dilakukan karena hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah belum dilakukan untuk tahun 2020.*

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.28.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		
				2020	2019	2018
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan	NILAI SAKIP oleh APIP	B		B	C

**Berdasarkan tabel di atas hasil perbandingan belum dapat dilakukan karena hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah belum dilakukan untuk tahun 2020.*

c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja:

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	117.703.775	80.398.487	APBD

		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	126.192.000	118.894.000	APBD
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.663.000	4.548.000	APBD
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	16.460.000	11.460.000	APBD
		Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	225.461.400	225.326.800	APBD
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	101.678.900	99.397.800	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	APBD
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	APBD
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	9.000.000	APBD
		Pengadaan Mobelur	-	-	APBD
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	68.957.500	68.900.000	APBD
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	42.467.850	37.803.365	APBD
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	2.100.000	1.500.000	APBD
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	2.200.000	980.000	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	7.500.000	7.500.000	APBD
	Program Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.664.000	6.657.000	APBD
		Penyusunan Laporan Keuangan	10.385.500	10.385.500	APBD

		Semesteran			
	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	7.604.000	7.604.000	APBD
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	-	-	APBD
		Promosi dan Pameran Pembangunan	-	-	APBD

1.1 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.070.224.633,- (97,21%)

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.366.230.321,-
- Belanja Langsung	Rp. 1.553.683.052,-
- Belanja Modal	Rp. 9.000.000,-

Jumlah **Rp. 4.928.913.373,-**

3. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.445.244.633,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.366.230.321,- atau 97,7% yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai.

2) Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.616.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.553.683.052,- atau 96,14% dengan jumlah 8 program dan 40 kegiatan.

3) Belanja Modal

Anggaran belanja Modal Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.000.00,- dan terealisasi sebesar Rp.

9.000.000,- atau 100% digunakan untuk belanja Peralatan dan Mesin.

3.3 Hambatan dan Permasalahan

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Hambatan dan Permasalahan

1. Aspek Pemerintahan

- Belum maksimalnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsinya
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pelatihan
- Masih kurangnya tenaga instruktur/pelatih dan tenaga pengawas ketenagakerjaan serta tenaga pengawasan ketenagakerjaan serta tidak adanya mediator dan pengantar kerja.
- Belum memadainya sistem informasi dan komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat serta dukungan pihak terkait dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan.
- Semakin besarnya tuntutan dan dinamika masyarakat dalam pemenuhan segala aspek kehidupan dalam hal mencapai kehidupan yang layak.
- Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dalam hal pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran.
- Keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan dunia usaha baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.

2. Aspek Dunia Usaha

- Masih rendahnya kepekaan dan daya tangkap masyarakat terhadap peluang usaha dan kebutuhan pasar dalam penciptaan wirausaha baru.

- Rendahnya kemampuan mengakses informasi pasar kerja terutama pada sektor industri
- Pelaksanaan jaringan usaha dan pola kemitraan belum berjalan optimal
- Masih banyaknya pengusaha yang belum memenuhi kewajiban kepada pemerintah sesuai dengan norma kerja
- Komitmen perwujudan pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah belum optimal, hal ini disebabkan oleh dominasi pengusaha yang besar.
- Persaingan dunia usaha semakin meningkat akan tetapi fluktuasi praktek monopoli kegiatan usaha semakin berkembang.

3. Aspek Masyarakat

- Tingginya angka pengangguran
- Jiwa wirausaha yang lemah
- Kurangnya investasi yang memberikan lowongan pekerjaan
- Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pasar
- Masih rendahnya pemanfaatan potensi lokal masyarakat dalam hal pembinaan pemberdayaan tenaga kerja
- Masih rendahnya budaya dan etos kerja pada sebagian masyarakat sehingga berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran
- Masih adanya pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa bekerja adalah menjadi pegawai negeri.
- Semakin tingginya tingkat persaingan antar daerah dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah.
- Semakin besarnya tuntutan dan dinamika masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara luas.

3.4 Pemecahan Masalah

Untuk menyikapi permasalahan ketenagakerjaan tersebut di atas, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atau perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone untuk tahun 2018-2023, seiring dengan adanya Pandemi Covid-19 serta adanya perubahan regulasi serta kondisi perekonomian. Hal ini juga terkait dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bone tahun 2018-2023, sehingga dapat sesuai dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
2. Sebagai langkah solutif atas permasalahan/ hambatan tersebut, maka telah dilakukan penyesuaian khusus dari aspek pembiayaan dan pengupayaan peningkatan sumber daya manusia aparatur melalui bimbingan teknis aparat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan memberdayakan tenaga pelatih/ instruktur yang ada dan mengontrak instruktur sesuai kebutuhan serta mengatur jadwal kegiatan pelatihan sedemikian rupa sehingga instruktur yang ada dapat diatur dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelatihan.
4. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terhadap kekurangan pegawai khususnya tenaga pengawasan, mediator, pengantar kerja dan instruktur sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
5. Mengadakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja terhadap program kelembagaan dan perlindungan ketenagakerjaan
6. Melaksanakan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi, masyarakat dan berbasis kewirausahaan berdasarkan sumber daya alam suatu wilayah dan sumber daya manusia.
7. Menginventarisir pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan keterampilan dari berbagai jenis kejuruan sebagai tenaga kerja siap pakai.
8. Meningkatkan koordinasi pada instansi terkait, stake holder dan perusahaan untuk penyerapan tenaga kerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Melakukan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone untuk tahun 2018-2023, seiring dengan adanya Pandemi Covid-19 serta adanya perubahan regulasi serta

kondisi perekonomian. Hal ini juga terkait dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bone.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA 2018-2023. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone pada tahun 2020 Cukup baik, karena terdapat indikator yang pencapaiannya cukup baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah pada tahun 2020.. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA 2018-2023 dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Kondisi Corona Virus Disease (Covid-19) telah mempengaruhi berbagai kondisi bahwa hampir di semua sector. Sektor pembangunan, baik sumber daya manusia maupun pembangunan fisik menjadi terganggu. Hal ini kemudia menjadi tantangan dalam hal pencapaian kinerja.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone ke depan, maka kami akan merumuskan langkah-langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah untuk dijadikan masukan atau sebagai strategi pemecahan masalah untuk dijadikan masukan atau

sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang. Bagi instansi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone sendiri, ini bisa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.